

RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2021 – 2026



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021

Jln.17 Agustus Nomor 69 Telepon 865559, 862701 Fax 860420
<http://www.bkad.sulutprov.go.id> email bkad@sulut.go.id
MANADO 95119

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 - 2026 dapat diselesaikan selaras dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 - 2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Pemerintah Daerah. Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 - 2026 adalah untuk menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 - 2026 ini merupakan suatu proses penyusunan rencana kerja yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 -2026 bertujuan untuk **Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan** serta sasaran **Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan** sesuai dengan **Misi 5 (lima) yaitu Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Didukung Oleh Sinergitas Antar Daerah.**

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026 ini. Semoga dengan ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026 ini akan memberikan kejelasan dan manfaat bagi perkembangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026 dan semua pihak sebagai mitra kerja.

Manado, 26 September 2021

DAFTAR ISI

	Kata Pengantar.....	2 - 3
	Daftar Isi.....	4 - 6
BAB I	PENDAHULUAN.....	7
	Latar Belakang.....	7 - 11
	Landasan Hukum.....	12 - 14
	Maksud dan Tujuan.....	14
	Sistematika Penulisan.....	15
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.....	16
	Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara.....	16 - 23
	Sumber Daya Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara	24 - 25
	Sarana dan Prasarana Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara.....	25 - 33
	Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara.....	34 - 38
	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara.....	43 - 44
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.....	45
	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara.....	45
	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	45 - 52
	Telaahan Rencana Strategis K/L dan Renstra	53 - 54
	Penentuan Isu-isu Strategis.....	54 - 58
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	59
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	60
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	63 - 64
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	70
BAB VIII	PENUTUP.....	72

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR BAB 2.1	AKTIVITAS KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.....	18
GAMBAR BAB 2.2	AKTIVITAS SEKRETARIAT BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.....	19
GAMBAR BAB 2.3	AKTIVITAS BIDANG ANGGARAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.....	20
GAMBAR BAB 2.4	AKTIVITAS BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.....	21
GAMBAR BAB 2.5	AKTIVITAS BIDANG AKUNTANSI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.....	21
GAMBAR BAB 2.6	AKTIVITAS BIDANG ASET BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.....	22
GAMBAR BAB 2.7	STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.....	23
GAMBAR BAB 2.8	ASET TETAP TANAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.....	26
GAMBAR BAB 2.9	ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.....	27
GAMBAR BAB 2.10	LANJUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.....	28
GAMBAR BAB 2.11	ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.....	29
GAMBAR BAB 2.12	ASET TETAP JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.....	30
GAMBAR BAB 2.13	ASET TETAP LAINNYA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.....	30
GAMBAR BAB 2.14	SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI.....	30
GAMBAR BAB 2.15	SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI.....	31
GAMBAR BAB 2.16	SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI.....	32
GAMBAR BAB 2.17	SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI.....	33
GAMBAR BAB 2.18	OPINI BPK TERHADAP LKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 – 2020.....	35
GAMBAR BAB 2.19	OPINI BPK TERHADAP LKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA.....	35
GAMBAR BAB 2.20	ANGGARAN DAN REALISASI APBD TAHUN 2016 – 2020.....	36
GAMBAR BAB 2.21	PERSENTASE SILPA TAHUN 2016 – 2020.....	36
GAMBAR BAB 2.22	PENETAPAN APBD TAHUN 2016 – 2020.....	36
GAMBAR BAB 2.23	PERSENTASE (ANGGARAN DAN REALISASI) BELANJA PENDIDIKAN (20%) TAHUN 2017 – 2020.....	37
GAMBAR BAB 2.24	PERSENTASE (ANGGARAN DAN REALISASI) BELANJA KESEHATAN (10%) TAHUN 2019 – 2020.....	38
GAMBAR BAB 2.25	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.....	46
GAMBAR BAB 2.26	MISI 5 STRATEGI PEMBANGUNAN SULAWESI UTARA TAHUN 2021 – 2026.....	49
GAMBAR BAB 2.27	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN.....	50

DAFTAR TABEL

TABEL 2.2.1.1	SDM APARATUR BERDASARKAN GOLONGAN.....	24
TABEL 2.2.1.2	SDM APARATUR BERDASARKAN PENDIDIKAN FORMAL.....	24
TABEL 2.2.1.3	SDM APARATUR BERDASARKAN TINGKAT ESELONISASI.....	25
TABEL 2.2.1.4	SDM APARATUR BERDASARKAN DIKLAT STRUKTURAL.....	25
TABEL 2.2.1.5	SDM APARATUR BERDASARKAN DIKLAT FUNGSIONAL.....	25
TABEL T-C.23	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.....	39 - 41
TABEL T-C.24	ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.....	42
TABEL T-C.25	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.....	60
TABEL T-C.26	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RPJMD 2021-2026 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.....	62
TABEL T-C.27	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.....	65-69
TABEL T-C.28	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan berdasarkan prinsip – prinsip meliputi :

1. Perencanaan yang disusun merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya masing – masing;
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah;
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi wilayah yang dimiliki masing – masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dalam rencana pembangunan Daerah adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah dilantik. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program-program pembangunan daerah baik per Perangkat Daerah maupun lintas Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026 memiliki nilai strategis sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Terutama dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan urusan

pemerintahan selama lima tahun. Pada tingkat Perangkat Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Isu – isu strategis lainnya dalam perencanaan lima tahun ke depan, antara lain :

- 1) Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak pada tahun 2024;
- 2) Program prioritas, target, pengarusutamaan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024, termasuk didalamnya, pengembangan Manado – Likupang sebagai salah satu dari 5 (lima) destinasi pariwisata super prioritas. Empat pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam RPJMN 2020 – 2024 meliputi kesetaraan gender, pembangunan berkelanjutan, modal sosial dan budaya, serta transformasi digital.
- 3) Pencapaian visi RPJPD Provinsi Sulawesi Utara 2005 – 2025, yaitu Sulawesi Utara yang Berbudaya, Berdaya Saing, Aman dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Kawasan Asia Timur dan Pasifik.
- 4) Pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM), urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas: 1) pendidikan, 2) kesehatan, 3) pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.
- 5) Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) sesuai *Roadmap* Pembangunan Perkotaan Nasional, melalui indikator kota layak huni.
- 6) Penanganan Isu Lingkungan Hidup.
- 7) Bonus demografi, adalah potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umur penduduk, dimana proporsi usia Kerja (15-65 tahun) lebih besar daripada proporsi bukan usia Kerja (0-14 tahun dan >65 tahun). Untuk itu, Penciptaan lapangan kerja bagi tenaga kerja yang masuk dalam kategori “bonus” perlu difasilitasi, termasuk juga menciptakan lapangan kerja baru sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.
- 8) Pembangunan dalam Era *New Normal*, yaitu pembangunan dalam era perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan *Covid-19*.
- 9) Penegakan peraturan daerah dan keselarasan dengan RT-RW.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) juga memperhatikan 5 (lima) arahan utama Presiden mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Renstra, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan amanat perundang-undangan diatas, dan dengan telah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2005 – 2025 lewat Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Utara 2005 - 2025. Sesuai kondisi diatas dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta telah dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 - 2026 sebagai penjabaran dari RPJP Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan beberapa orientasi yaitu:

1. Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses yang terdiri atas:
 - a. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;

- b. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
 - c. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
 - d. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.
2. Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi,
 3. Menggunakan pendekatan:
 - a. Holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
 - b. Integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
 - c. Spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sulut Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang melaksanakan unsur pengelolaan keuangan dan barang milik daerah daerah. Maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai satu-satunya organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang menerima pelimpahan wewenang dari Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah untuk menyelenggarakan urusan pada aspek pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Berdasarkan wewenang dan amanat yang diemban, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara bertekad untuk mewujudkan **Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik** dengan **Meningkatkan efektifitas dan efisiensi Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang lebih transparan dan Akuntabel melalui teknologi**

Informasi dengan transformasi digital dan bertekad untuk meningkatkan kapasitas tatakelola Pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.

Untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 yang diantaranya memuat analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam RPJMD, dengan berbagai permasalahan yang nanti dihadapi dan pemecahan atas permasalahan tersebut yang terencana dengan memperhitungkan potensi, peluang, hambatan dan tantangan yang dipergunakan sebagai arahan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi dalam periode lima tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun sebagai penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam aspek pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagai salah satu modal dasar terselenggaranya pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang diemban, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara ikut berperan mendukung Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mewujudkan tujuan dari misi 5 yaitu **meningkatkan efektifitas dan Efisiensi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan** .

Melalui dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 - 2026 tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara selama kurun waktu lima tahun (Tahun 2021-2026) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan urusan yang ditangani untuk mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi

Utara dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2020-2024;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Utara 2005 – 2025;
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 – 2034;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
32. Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020 – 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 - 2026 adalah menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 - 2026, sebagai berikut:

- 1) Mendukung Visi, Misi dan program pembangunan daerah 5 (lima) tahun;
- 2) Memberikan pedoman bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan perencanaan penganggaran;
- 3) Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur;

- 4) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, konsisten dan terintegrasi baik antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 menguraikan pokok bahasan dengan susunan garis besar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.
- 2.2 Sumberdaya.
- 2.3 Kinerja pelayanan.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKAD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara.
- 3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.
- 3.4 Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP.

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA****2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai unsur penunjang yang menyelenggarakan urusan administrasi keuangan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara, maka tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

b. Fungsi

Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis;
2. penyusunan perencanaan, pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;
3. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
4. penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara terdapat Susunan organisasi terdiri dari :

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

2. Sekretariat membawahi:

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Sub Bagian Umum.

3. Bidang Anggaran membawahi :

1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Sub Bidang Pengendalian Pelaksanaan Anggaran.
3. Sub Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota.

4. Bidang Perbendaharaan membawahi :

1. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Gaji.
2. Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
3. Sub Bidang Pengelolaan Kas.

5. Bidang Akuntansi membawahi :

1. Sub Bidang Pelaporan Keuangan
2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kas
3. Sub Bidang Investasi Hutang dan Piutang

6. Bidang Aset membawahi:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset.
2. Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan dan Pengamanan Aset.
3. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset.

Adapun tugas masing – masing, adalah sebagai berikut :

KEPALA BADAN mempunyai tugas:

- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. penyusunan perencanaan, pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;
- e. penyelenggaraan urusan anggaran;
- f. penyelenggaraan urusan perbendaharaan;
- g. penyelenggaraan urusan akuntansi;
- h. penyelenggaraan urusan aset;
- i. penyelenggaraan tugas selaku Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat Penatausahaan Barang; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

GAMBAR BAB 2.1



SEKRETARIAT

Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mempunyai tugas penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian dan hukum, perencanaan dan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- b. pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi;
- c. penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan kegiatan;
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian dan hukum;
- e. penyelenggaraan urusan perencanaan dan keuangan;
- f. penyelenggaraan urusan umum;
- g. penyelenggaraan tugas selaku Pembantu PPKD/BUD dan Pejabat Penatausahaan Barang; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

GAMBAR BAB 2.2



BIDANG ANGGARAN

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan di bidang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengendalian pelaksanaan anggaran dan pembinaan keuangan kabupaten/kota serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan di bidang anggaran;
- b. pengoordinasian perencanaan di bidang anggaran;
- c. penyelenggaraan urusan penyusunan anggaran pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan;
- d. penyelenggaraan urusan pengendalian pelaksanaan anggaran;

- e. penyelenggaraan urusan pembinaan keuangan kabupaten/kota;
- f. penyelenggaraan tugas selaku Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD) Bidang Anggaran; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

GAMBAR BAB 2.3**BIDANG PERBENDAHARAAN**

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan administrasi gaji, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran daerah dan pengelolaan kas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan di bidang perbendaharaan;
- b. pengoordinasian di bidang perbendaharaan;
- c. penyelenggaraan urusan pengelolaan administrasi gaji;
- d. penyelenggaraan urusan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran daerah;
- e. penyelenggaraan urusan pengelolaan kas;
- f. penyelenggaraan tugas selaku Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD) Bidang Perbendaharaan; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

GAMBAR BAB 2.4



BIDANG AKUNTANSI

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan di bidang pelaporan keuangan, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan investasi hutang dan piutang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan di bidang akuntansi;
- b. pengoordinasian di bidang akuntansi;
- c. penyelenggaraan urusan pelaporan keuangan;
- d. penyelenggaraan urusan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
- e. penyelenggaraan urusan investasi, hutang dan piutang;
- f. penyelenggaraan tugas selaku Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD) / Bendahara Umum Daerah (BUD) Bidang Akuntansi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

GAMBAR BAB 2.5



BIDANG ASET

Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan di bidang perencanaan dan penatausahaan aset, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset, pemindahtanganan dan penghapusan aset serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Aset mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan penatausahaan aset;
- b. pengoordinasian urusan di bidang aset;
- c. penyelenggaraan urusan perencanaan dan penatusahaan aset;
- d. penyelenggaraan urusan penggunaan, pemanfaatan pengamanan aset;
- e. penyelenggaraan urusan pemindahtanganan dan penghapusan aset;
- f. penyelenggaraan tugas selaku Pengurus Barang Pengelola Bidang Aset; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

GAMBAR BAB 2.6



GAMBAR BAB 2.7

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA.**



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki Sumber daya yaitu mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional, yang diuraikan dibawah ini.

2.2.1 Potensi Sumber Daya Manusia di Badan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 2.2.1.1. SDM Aparatur Berdasarkan Golongan

Status Kepegawaian	Jumlah
Golongan IV	8
Golongan III	92
Golongan II	15
Golongan I	0
J u m l a h	115

Tabel 2.2.1.2. SDM Aparatur Berdasarkan Pendidikan Formal

Status Kepegawaian	Jumlah
Setingkat Doktor (Strata III)	-
Setingkat Magister (Strata II)	17
Setingkat Sarjana (Strata I)	53
D-IV	6
D-III	4
Setingkat SLTA	34
Setingkat SLTP	-
Setingkat SD	1
J u m l a h	115

Tabel 2.2.1.3. SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Eselonisasi

Status Kepegawaian	Jumlah
Eselon II	1
Eselon III	5
Eselon IV	15
Jabatan Fungsional Umum	95
Staf Khusus	5
Tenaga Harian Lepas	18

Tabel 2.2.1.4. SDM Aparatur Berdasarkan Diklat Struktural

Status Kepegawaian	Jumlah
DIKLAT LEMHANAS	-
DIKLAT PIM I	-
DIKLAT PIM II	-
DIKLAT PIM III/SPAMA	4
DIKLAT PIM IV/ADUM/SEPADA	9
DIKLAT Pra Jabatan	89

Tabel 2.2.1.5. SDM Aparatur Berdasarkan Diklat Fungsional

Status Kepegawaian	Jumlah
DIKLAT Barang dan Jasa	5
DIKLAT Keuangan Daerah	29
DIKLAT Perencanaan	1
DIKLAT Kepegawaian	2

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Saat ini Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan alamat di Jl. 17 Agustus No. 69 Manado. Jalan 17 Agustus merupakan kawasan perkantoran yang dekat dengan kawasan bisnis, kawasan perumahan dan dikelilingi oleh kawasan pendidikan.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara ditunjang dengan sarana dan prasarana antara lain:

1. ASET TETAP TANAH



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DAFTAR ASET TANAH

TAHUN ANGGARAN 2020
PER 31-Dec-2020

Provinsi : PROVINSI SULAWESI UTARA
Unit Organisasi : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
U P B : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)
1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	TANAH		
	- Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	Desa Leleko Kec Remboken Kab Dati II Minahasa Prov. Sulut Manado Sulut	29.800,00
	- Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	Jln TNI Kel Kumaraka Kec. Wenang Kota Manado	473,00
	- Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalaow/Cottage	Pulau Bunaken	11.450,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jln Dendengan Dalam Kec Tikala Manado	10.000,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jln Diponegoro Kec Wenang	948,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jln. Sam Ratulangi Manado	0,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Provinsi Sulawesi Utara Kab. Minahasa Kec. Kakas Desa Wasian	79.280,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Provinsi Sulawesi Utara Kab. Minahasa Kec. Remboken Desa	15.703,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Provinsi Sulawesi Utara Kab. Minahasa Kec. Remboken Desa Leleko	2.010,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Provinsi Sulawesi Utara Kab. Minahasa Kec. Remboken Desa	17.012,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Provinsi Sulawesi Utara Kab. Minahasa Kec. Tondano Kel. Roong	9.250,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Provinsi Sulawesi Utara Kab. Minahasa Kec. Tondano Kel.	8.075,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Provinsi Sulawesi Utara Kab. Minahasa Kec. Tondano Selatan Kel.	33.260,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Tanah Negara Pineleng	109.400,00
	- Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Terbuka	Ranomuut Manado	0,00
	- Tanah Lapangan Golf	Kayuatu Manado	442.850,00
	- Tanah Lapangan Sepak Bola	Jln. Sam Ratulangi Manado	0,00
	- Tanah Lapangan Sepak Bola	Tanah Stadion Klabat Jln Sam Ratulangi No 02 Kec Wanea	52.852,00
	- Tanah Kampung	Desa Kawiley Kec. Kauditan	100.008,00
	- tanah kampung lainnya (dst)	Buha	255.248,00

DAFTAR ASET TETAP - TANAH

GAMBAR BAB 2.8

2. ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DAFTAR ASET TETAP
PERALATAN DAN MESIN

TAHUN ANGGARAN 2020

PER 31-Dec-2020

Provinsi : PROVINSI SULAWESI UTARA
Unit Organisasi : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
U P B : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NO

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.264
	ALAT BESAR	1
	- Portable Generating Set	1
	KOMPUTER	635
	- Internet	2
	- Komputer Jaringan lainnya	2
	- P.C Unit	156
	- Lap Top	38
	- Note Book	72
	- Personal Komputer lainnya	8
	- Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	2
	- Hard Disk	67
	- peralatan mainframe lainnya (dst)	1
	- Peralatan Minikomputer lainnya	2
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	197
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	13
	- External	10
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	49
	- Server	7
	- Modem	1
	- Peralatan Jaringan lainnya	8
	ALAT ANGKUTAN	31
	- Jeep	1
	- Station Wagon	14
	- Pick Up	2
	- Sepeda Motor	9
	- Gerobak Dorong	5
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	17
	- Mesin Bor	1
	- Tabung NH3	8
	- alat ukur universal lainnya (dst)	2
	- Scanner (Universal Tester)	1
	- Lampu Untuk Menerangi Skala Neraca Pakai Standar	5
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.447
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	6
	- Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	4
	- Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1
	- Mesin Hitung Elektronik/Calculator	5
	- Mesin Penghitung Uang	3
	- Mesin Fotocopy Folio	4
	- Lemari Besi/Metal	8
	- Lemari Kayu	15
	- Rak Besi	30
	- Rak Kayu	18
	- Filing Cabinet Besi	14
	- Brandkas	6
	- Lemari Sorok	10
	- Lemari Kaca	8
	- Lemari Makan	3
	- CCTV - Camera Control Television System	14

GAMBAR BAB 2.9

LANJUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DAFTAR ASET TETAP
PERALATAN DAN MESIN
 TAHUN ANGGARAN 2020
PER 31-Dec-2020

Provinsi : PROVINSI SULAWESI UTARA
Unit Organisasi : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
U P B : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.264
	- White Board	4
	- Alat Penghancur Kertas	11
	- Mesin Absensi	13
	- Alat Pemotong Kertas	3
	- Headmachine Besar	1
	- Overhead Projector	6
	- Display	2
	- Alat Kantor Lainnya	63
	- Meja Kerja Besi/Metal	2
	- Meja Kerja Kayu	4
	- Kursi Besi/Metal	66
	- Meja Rapat	2
	- Tempat Tidur Besi	8
	- Meja Resepsionis	7
	- Meja Makan Besi	3
	- Kursi Rapat	38
	- Kursi Tamu	22
	- Kursi Putar	51
	- Meja Komputer	2
	- Sofa	31
	- Meubeleur lainnya	2
	- Jam Elektronik	7
	- Alat Pengukur Waktu lainnya	4
	- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2
	- Lemari Es	11
	- A. C. Window	27
	- A. C. Split	45
	- Kipas Angin	8
	- Exhaust Fan	33
	- Teko Listrik	1
	- Kitchen Set	1
	- Alat Dapur lainnya	36
	- Televisi	28
	- Loudspeaker	3
	- Sound System	28
	- Wireless	5
	- Mic Conference	27
	- Unit Power Supply	149
	- Camera Video	14
	- Alat Hiasan	11
	- Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1
	- Tangga Aluminium	8
	- Dispenser	29
	- Coffee Maker	14
	- Handy Cam	2
	- Karpet	26
	- Vertikal Blind	37
	- Gordyin/Kray	1
	- Tangga	2
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	31
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	2
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	11
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	29
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	90
	- Meja Kerja Pejabat lain-lain	2
	- Meja Rapat Pejabat Eselon III	2
	- Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1
	- Meja Tamu Biasa	2
	- Meja Rapat Pejabat lainnya	2
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	18
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	35
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	126
	- Kursi Kerja Pejabat lainnya	7
	- Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	1
	- Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	24
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	10
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	115
	- Uninterruptible Power Supply (UPS)	75
	- Camera Electronic	5
	- Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	3
	- Camera Film	1
	- Layar Film/Projector	29
	- Alat Studio Video Lainnya	1
	- Telephone (PABX)	1
	ALAT LABORATORIUM	17
	- Video Printer	1
	- Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	15
	- Software Conf Off-Line Computer	1
	ALAT PERSENDATAAN	1
	- Canon	1

DAFTAR ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN

GAMBAR BAB 2.10

3. ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DAFTAR ASET
GEDUNG DAN BANGUNAN

TAHUN ANGGARAN 2020
PER 31-Dec-2020

Provinsi : PROVINSI SULAWESI UTARA
Unit Organisasi : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
U P B : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)
1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BANGUNAN GEDUNG		
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jalan Diponegoro Manado	
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Dendengan Dalam Manado	2.385,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kelurahan Teling Manado	
	- Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Kayuatu	120,00
	- Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Miangas Marore	
	- Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Jl. Sam Ratulangi Manado	9.179,00
	- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat	Desa Leleko Minahasa	3.604,00

DAFTAR ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN

GAMBAR BAB 2.11**4. ASET TETAP JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI**

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DAFTAR ASET
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI

TAHUN ANGGARAN 2020
PER 31-Dec-2020

Provinsi : PROVINSI SULAWESI UTARA
Unit Organisasi : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
U P B : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI
1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BANGUNAN AIR	
	- Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	Rumah Dinas Kepala Biro Bumi

DAFTAR ASET TETAP - JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI

GAMBAR BAB 2.12

5. ASET TETAP LAINNYA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DAFTAR ASET TETAP
ASET TETAP LAINNYA
 TAHUN ANGGARAN 2020
PER 31-Dec-2020

Provinsi : PROVINSI SULAWESI UTARA
Unit Organisasi : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
U P B : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5
	BAHAN PERPUSTAKAAN	3
	- Buku Umum Lain-lain	3
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	1
	- Alat Musik Modern/Band	1
	ASET TETAP DALAM RENOVASI	1
	- Aset Renovasi	1

DAFTAR ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA

GAMBAR BAB 2.13

Dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan mempergunakan sistem dalam melaksanakan tata kelola keuangan dan barang milik daerah yaitu antara lain :

GAMBAR BAB 2.14

SIMD@
KEUANGAN DAERAH

SIMD@
BARANG MILIK DAERAH



GAMBAR BAB 2.15

SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH



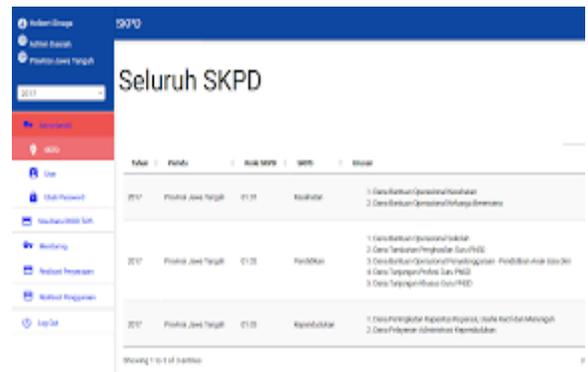
SISTEM INFORMASI GAJI PNS



OMSPAN UNTUK PELAPORAN DATA DAK FISIK



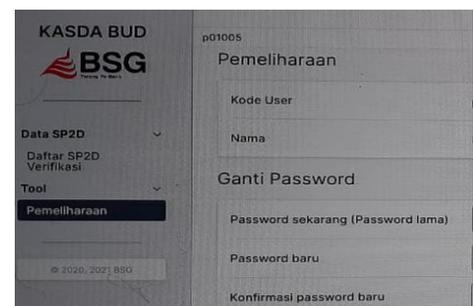
ALADIN PELAPORAN DATA DAK NON FISIK



SIMTRADA UNTUK MEMONITORING DANA TRANSFER DARI PEMERINTAH PUSAT



KASDA ONLINE BUD UNTUK PROSES TRANSAKSI PEMINDAHBUKUAN DARI RKUD KE REKENING BENDAHARA OPD DAN REKENING PENERIMA



GAMBAR BAB 2.16

SIMPONI UNTUK PEMBUATAN BILLING PFK (IWP, ASKES, BPJS)



SINERGI SIKD CORE UNTUK PELAPORAN DTH/RTH



SIMD@ PAJAK UNTUK MENARIK DATA TRANSAKSI PAJAK

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Data SPP Yang Sudah di SPM-kan

No. SPP : 0046/SPP-LS/4.1.1/2018
No. SPM : 0046/SPM-LS/4.1.1/2018

Jumlah SPM : 400.000.000

Uraian Rekening Potongan	Potongan SPM	Nilai
Penerimaan PFK - PPh Ps. 4	Pajak Penghasilan P. 4 (2)	13.636.364
Penerimaan PFK - PPh Pusat	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	45.454.545

Jenis: 0
Rekening: Penerimaan PFK - PPh Ps. 4
Nilai: 13.636.364

SINERGI SIKD CORE UNTUK PELAPORAN REALISASI PEMBAYARAN GAJI DAN TAMBAHAN PENGHASILAN



SIMPATIK UNTUK PELAPORAN POSISI KAS DAN PERKIRAAN BELANJA BULANAN



KRISNA UNTUK PERENCANAAN DAN INFORMASI ANGGARAN DANA PEMERINTAH PUSAT KE DAERAH



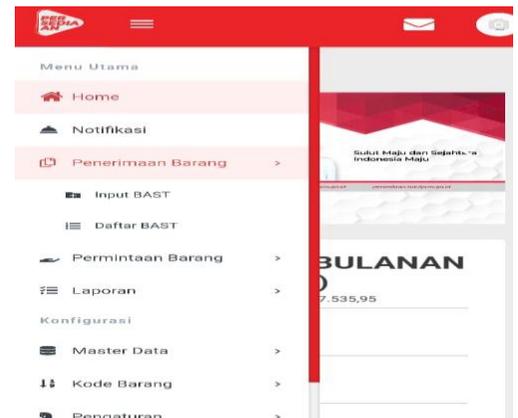
GAMBAR BAB 2.17

DJP ONLINE UNTUK PEMBUATAN BILLING PAJAK OLEH BUD

ASET TERPADU REKONSILIASI BELANJA MODAL



SISTEM INFORMASI ADMIN PERSEDIAAN (SIAP)



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor Nomor 34 Tahun 2018, kedudukan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset daerah diantaranya membantu Gubernur Sulawesi Utara dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan APBD, melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah, dan menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan juga sebagai Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah. Dalam mengoptimalkan tugas tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan fungsi Perumusan Kebijakan Teknis, Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas, Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah, Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan, bina keuangan kabupaten/kota, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam perkembangannya Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara berusaha menyempurnakan kinerja dan pelayanan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama **yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)** dengan Indikator Kinerja adalah **Opini BPK RI atas Laporan Keuangan dan Jumlah Dokumen Manajemen Aset.**

**DAFTAR OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN 2020**

TAHUN	OPINI BPK
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

GAMBAR BAB 2.18



BERITA

SENIN, 03 MEI 2021

DILIHAT 23X



PEMROV SULUT RAIH WTP 7 KALI BERTURUT- TURUT

Manado, 3 Mei 2021 - Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sekaligus Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Asiano G. Kawatu, SE,...

Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah dan BPK- RI

GAMBAR BAB 2.19

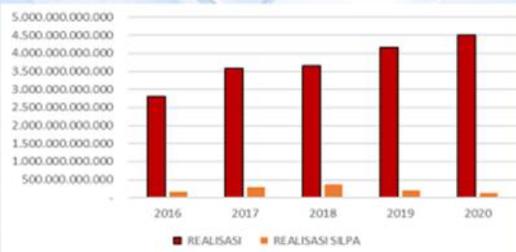
GAMBAR BAB 2.20**ANGGARAN DAN REALISASI APBD TAHUN 2016 - 2020**

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
2016	2.986.450.969.444,00	2.801.145.395.510,00	93,80
2017	3.852.822.284.520,00	3.580.571.793.429,00	92,93
2018	4.129.013.863.900,00	3.656.101.961.037,95	88,55
2019	4.773.414.364.699,79	4.156.494.291.530,00	87,08
2020	5.092.887.460.620,38	4.501.905.708.338,00	88,40

Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah
APBD Tahun Anggaran 2016 - 2020 (Audited)

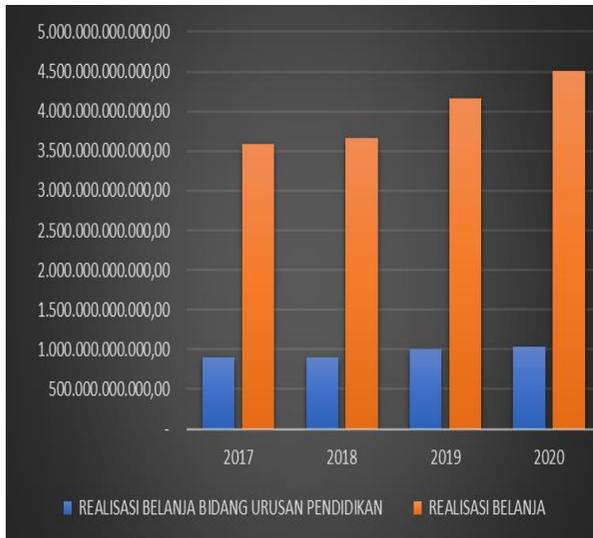
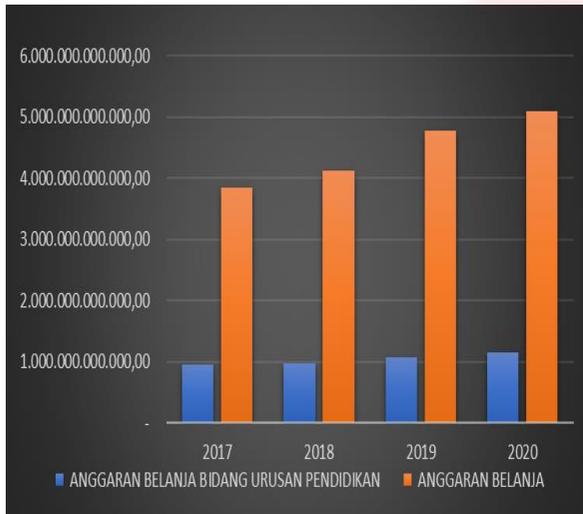
**GAMBAR BAB 2.21****PERSENTASE SILPA TAHUN 2016 - 2020**

TAHUN	REALISASI	REALISASI SILPA	PERSENTASE SILPA
2016	2.801.145.395.510	159.624.666.848,00	0,06
2017	3.580.571.793.429	300.954.556.426,00	0,08
2018	3.656.101.961.038	374.514.316.700,79	0,10
2019	4.156.494.291.530	195.997.699.977,38	0,05
2020	4.501.905.708.338	138.199.757.165,97	0,03

**GAMBAR BAB 2.22****PENETAPAN APBD TAHUN 2016 - 2020**

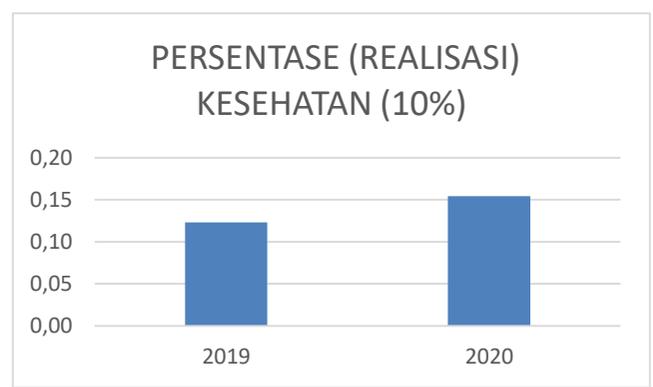
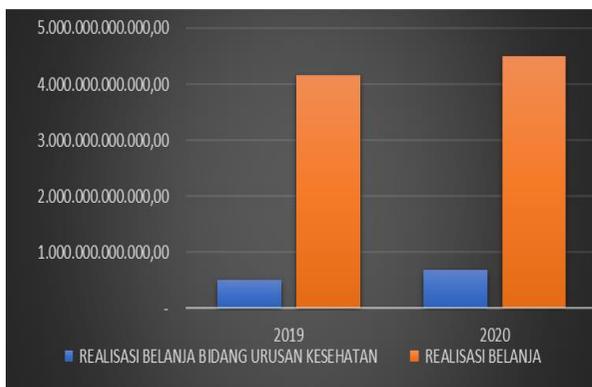
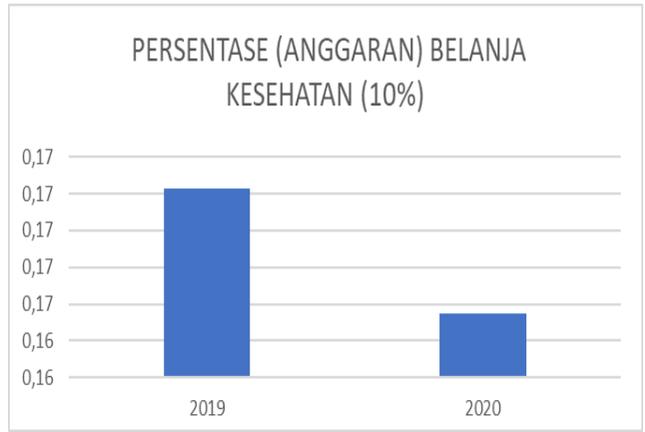
TAHUN	PENETAPAN APBD
2016	TEPAT WAKTU
2017	TEPAT WAKTU
2018	TEPAT WAKTU
2019	TEPAT WAKTU
2020	TEPAT WAKTU

GAMBAR BAB 2.23



**PERSENTASE (ANGGARAN DAN REALISASI)
BELANJA PENDIDIKAN (20%)TAHUN 2017 - 2020
SUMBER DATA :
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
APBD 2017 – 2020 (AUDITED)**

GAMBAR BAB 2.24



**PERSENTASE (ANGGARAN DAN REALISASI)
BELANJA KESEHATAN (10%)TAHUN 2019 - 2020
SUMBER DATA :
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
APBD 2019 – 2020 (AUDITED)**

TABEL T-C.23.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BKAD
PROVINSI SULAWESI UTARA

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021					Realisasi Capaian Tahun Tahun 2016 - 2021					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Penetapan APBD	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
2	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
3	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
4	Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung	-	-	-	46%	47%	47%	47%	47%	46%	47%	47%	47%	46%	1	1	1	1	0.98
5		-	-	-	54%	53%	53%	53%	53%	54%	53%	53%	53%	54%	1	1	1	1	1.02
6	Jumlah Dokumen Regulasi Keuangan dan Barang Milik Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1

LANJUTAN TABEL T-C.23

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021					Realisasi Capaian Tahun Tahun 2016 - 2021					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
8	Penyampaian LKPD Tepat Waktu	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
9	Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
10	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Tepat Waktu	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
11	Persentase SILPA terhadap APBD	-	-	-	5%	5%	5%	5%	5%	11%	10%	11%	14%	5%	0.45	0.50	0.45	0.36	1
12	Persentase Program/Kegiatan yang tidak terlaksana	-	-	-	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1	1	1	1	1
13					4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	1	1	1
14	Persentase Barang Milik Daerah yang terinventarisasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
15	Persentase Appraisal Barang Milik Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1

LANJUTAN TABEL T-C.23

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021					Realisasi Capaian Tahun Tahun 2016 - 2021					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
16	Jumlah Penghapusan Barang Milik Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
17	Jumlah Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
18	Penetapan Status Pengguna Barang Milik Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
19	RKBMD Perangkat Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
20	Jumlah Evaluasi Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang tepat Waktu	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
21	Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota yang dievaluasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
22	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Keuangan dan BMD	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
23	Jumlah Pelaksanaan Bimtek dan Sosialisasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
24	Persentase Penerbitan SPD	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
25	Persentase Penerbitan SP2D	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
26	Persentase Rekonsiliasi Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1

TABEL T-C.24.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.946.239.700	2.226.025.754	2.616.422.468	2.446.223.000	3.204.888.000	1.579.658.186	1.997.503.836	2.452.859.099	2.248.082.475	3.101.230.894	0,81	0,90	0,94	0,92	0,97	0,13	0,09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.932.302.250	1.474.020.500	2.961.203.146	3.959.430.300	1.191.110.000	3.682.851.348	1.373.971.411	2.840.568.158	3.899.044.337	1.063.304.764	0,94	0,93	0,96	0,98	0,89	-0,26	-0,08
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	213.034.000	131.670.000	300.600.000	204.500.000	277.500.000	212.206.500	131.670.000	290.147.761	190.676.500	265.417.000	1,00	1,00	0,97	0,93	0,96	0,07	0,19
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	94.007.450	74.726.100	330.175.000	271.500.000	159.330.000	65.516.150	72.744.023	273.316.877	268.874.000	138.421.600	0,70	0,97	0,83	0,99	0,87	0,14	0,17
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	142.239.100	117.796.988	23.000.000	32.000.000	35.000.000	81.641.000	111.789.338	22.432.350	31.798.700	33.922.500	0,57	0,95	0,98	0,99	0,97	-0,30	-0,27
Program Perencanaan SKPD	15.320.000	50.230.400	14.500.000	16.000.000	22.660.000	12.299.750	40.526.416	14.350.818	9.746.900	22.432.000	0,80	0,81	0,99	0,61	0,99	0,10	-0,18
Program Penganggaran Daerah	4.088.611.400	2.316.226.329	1.899.893.400	2.375.871.766	1.309.142.700	1.907.522.063	1.818.830.579	1.659.992.396	1.961.579.552	1.259.748.422	0,47	0,79	0,87	0,83	0,96	-0,25	-0,14
Program Penataan Regulasi Keuangan dan Barang Milik Daerah	1.021.219.000	342.796.500	322.150.300	1.220.486.300	527.450.300	817.159.400	211.016.915	302.092.711	1.130.478.054	506.707.700	0,80	0,62	0,94	0,93	0,96	-0,15	0,10
Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	297.643.500	449.856.500	609.011.000	956.348.000	109.534.000	261.820.075	448.434.095	580.077.200	945.455.955	107.812.700	0,88	1,00	0,95	0,99	0,98	-0,22	-0,30
Program Pengelolaan Belanja Transfer Daerah	939.307.250	1.005.695.300	1.107.277.300	1.113.774.234	718.304.100	825.273.384	892.358.362	1.069.534.003	1.079.266.890	643.170.221	0,88	0,89	0,97	0,97	0,90	-0,06	-0,11
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.258.665.900	1.618.774.700	1.935.027.400	2.071.588.700	1.299.746.250	1.076.015.632	948.557.464	1.704.740.377	1.987.696.231	1.243.466.530	0,85	0,59	0,88	0,96	0,96	0,01	-0,06
Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.532.271.050	1.571.358.500	1.607.505.000	1.970.404.000	1.397.789.000	1.336.956.820	1.506.798.539	1.586.417.324	1.904.766.781	1.143.251.246	0,87	0,96	0,99	0,97	0,82	-0,02	-0,08
Program Pembinaan dan Peningkatan Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota	1.629.566.600	1.623.816.982	549.491.600	969.550.000	544.118.800	1.506.339.495	1.282.506.740	516.845.730	806.675.700	523.260.058	0,92	0,79	0,94	0,83	0,96	-0,24	-0,25
Program Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah	1.382.794.550	1.343.926.600	1.209.100.000	1.473.860.000	934.787.000	1.260.902.700	1.294.322.349	1.191.832.084	1.463.611.858	917.834.780	0,91	0,96	0,99	0,99	0,98	-0,09	-0,09
Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah SKPD	1.145.983.250	878.492.985	772.894.000	1.160.773.700	631.934.350	945.776.416	807.350.952	730.499.445	1.133.314.157	545.744.098	0,83	0,92	0,95	0,98	0,86	-0,14	-0,11
Program Peningkatan Pengelolaan Investasi, Hutang dan Piutang Daerah	235.630.000	241.375.000	307.650.000	342.100.000	215.336.000	200.608.800	179.833.800	294.775.385	312.831.011	194.769.397	0,85	0,75	0,96	0,91	0,90	-0,02	-0,05
Program Penguatan Tata Laksana Pemerintah Daerah	-	32.776.500	-	-	-	-	16.972.924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,00

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak terlepas dengan berbagai permasalahan yang dijumpai sebagai hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan tatakerja pada pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dengan harapan tantangan-tantangan tersebut tidak lagi menjadi faktor penghambat jalannya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada periode yang akan datang. **Tantangan yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pengembangan pelayanan tersebut yaitu sebagai berikut:**

1. Belum optimalnya penyerapan belanja daerah yang dipengaruhi belum konsistennya Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran;
2. Komitmen Perangkat Daerah/unit kerja selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang masih rendah dalam melaksanakan tata kelola barang milik daerah;
3. Belum terwujudnya kehormanan informasi antara pengelola keuangan dan pengelola barang di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja;
4. Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam menyusun RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) dan RKPBM (Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah) belum disesuaikan dengan kebutuhan;
5. Belum optimalnya penerapan manajemen aset di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja atau belum terwujudnya tata kelola aset daerah yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah.

Sedangkan Peluang dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

1. Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menjadikan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai satu-satunya Perangkat Daerah yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan administrasi keuangan dan barang milik daerah dengan melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
2. Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mempertahankan opini WTP atas LKPD Provinsi Sulawesi Utara melalui pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual;

3. Tuntutan agar birokrasi pemerintah daerah bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel;
4. Perkembangan Teknologi informasi yang pesat membantu dalam proses pengumpulan data, analisis, peramalan dan pengambilan keputusan;
5. Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pajak dan retribusi daerah;
6. Pertumbuhan ekonomi yang stabil.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, diidentifikasi permasalahan-permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait belum efektif dan efisiennya pengelolaan barang milik daerah dan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti :

1. Perangkat Daerah yang belum mempunyai tenaga perencanaan, serta tenaga akuntan yang memadai;
2. Koordinasi antar SKPD untuk proses perencanaan masih lemah sehingga kegiatan yang dibangun jarang yang sinergis bahkan tidak jarang muncul egosektoral;
3. Belum semua ASN memahami regulasi yang mengatur kebijakan pengelolaan keuangan daerah sehingga mengakibatkan terdapatnya pengelolaan yang tidak sesuai ketentuan;
4. Belum maksimalnya tindak lanjut atas hasil temuan audit.
5. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
6. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
7. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/international, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);
8. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
9. Belum terwujudnya tata kelola aset tetap yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset tetap yang berakibat kurang akuratnya data barang milik daerah;
10. Belum terwujudnya tata kelola persediaan barang secara tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pelaporan;
11. Belum optimalnya penyerapan belanja daerah sesuai dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas;
12. Belum optimalnya pencatatan asset dengan sumber dana DAK Bidang Pendidikan (BOS);
13. Belum maksimalnya digitalisasi pengelolaan keuangan daerah baik aspek pendapatan maupun aspek belanja.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam periode 2021 - 2026, Visi Provinsi Sulawesi Utara adalah **“SULAWESI UTARA MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI PINTU GERBANG INDONESIA KE ASIA PASIFIK”**

Sejalan dengan Visi diatas misi yang dirumuskan untuk mewujudkan visi Provinsi Sulawesi Utara **“PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH DIDUKUNG OLEH SINERGITAS ANTAR DAERAH”**.



GAMBAR BAB 2.25

Visi ini terdiri dari 3 (tiga) kata dan/atau kalimat kunci yaitu:

1. **Maju**
2. **Sejahtera**
3. **Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik**

Visi 2021-2026 ini mengacu pada Visi Nasional dalam RPJMN (tegak lurus) dan arahan tahapan pelaksanaan untuk pencapaian Visi Pembangunan Sulawesi Utara dalam RPJPD 2005-2025. Dalam konteks pembangunan Sulawesi Utara, Visi ini menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang akan dicapai 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah. Aktualisasi pokok-pokok visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

Maju Ukuran “Maju” ditunjukkan oleh:

1. Kemampuan untuk menjamin Pemberdayaan Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Pariwisata dan jasa Sebagai Sumber Ketahanan Ekonomi daerah;
2. Kemampuan untuk meningkatkan kapasitas penerimaan dan pembiayaan pembangunan dan mengoptimalkan belanja daerah bersumber dari sumber daya lokal sehingga mengurangi ketergantungan sumber daya dari luar daerah;
3. Kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan kemajuan IPTEK/Digitalisasi dalam berbagai bidang;
4. Memiliki Litbang yang handal;
5. Terbentuknya Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental.

Sejahtera Ukuran “Sejahtera” ditunjukkan oleh:

1. Kemampuan menanggulangi kemiskinan, pengangguran serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan social;
2. Kemampuan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, cerdas dan sehat serta mampu memiliki daya saing;
3. Kemampuan beradaptasi dengan kebiasaan baru pasca pandemi *COVID-19*.

Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik Ukuran “Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik” ditunjukkan oleh:

1. Kesiapan untuk membangun sarana, prasarana, infrastruktur dan konektivitas yang merata dan berkeadilan dalam koridor ketahanan lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan;
2. Pelabuhan Hub Internasional Bitung sebagai pintu ekspor/impor ke Asia dan Pasifik;
3. Kesiapan kebijakan, sumberdaya manusia sebagai tujuan wisata dunia, tujuan *MICE (Meeting, Incentives, Conference and Exhibition)*, tujuan studi, pengembangan ilmu dan teknologi;
4. Kemampuan pemerintah membangun jaringan kerjasama regional, bilateral dan internasional untuk mendukung peningkatan kemampuan daerah;
5. Implementasi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, telah dirumuskan Misi dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan Sulawesi Utara. Misi Pembangunan Sulawesi Utara 2021-2026 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. MISI 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara;
2. MISI 2 : Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa;
3. MISI 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas;
4. MISI 4 : Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Lingkungan
- 5. MISI 5 : Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar Daerah.**

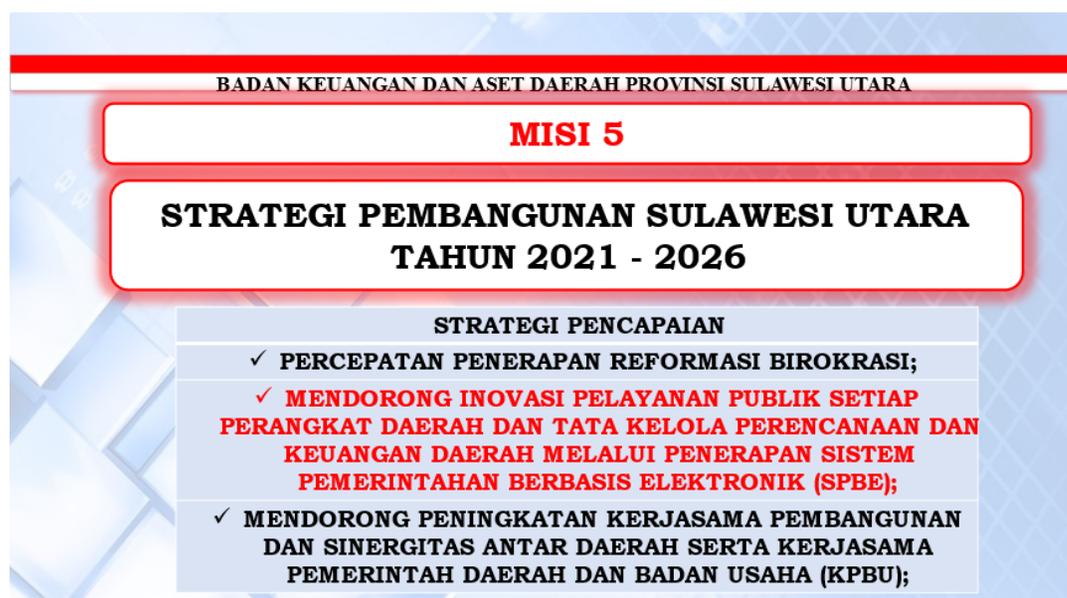
Berdasarkan Visi Sulawesi Utara 2021 – 2026 tersebut, maka terdapat 10 (sepuluh) prioritas pembangunan daerah, antara lain :

1. Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Sosial Dampak Pandemi *Covid-19*;
2. Pembangunan Konektifitas;

3. Meningkatkan Sarana Pendidikan Yang Layak Dan Adaptif Teknologi, Serta Dukungan Bagi Generasi Milenial Agar Memiliki Karakter Budaya dan Intelegualitas Yang Mumpuni;
4. Meningkatkan Soliditas Dan Peran Tokoh Agama Dalam Menjaga Harmonisasi Kerukunan Yang Telah Terbina Sangat Baik;
5. Melanjutkan Dan Meningkatkan Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan;
6. Melanjutkan Dan Meningkatkan Kualitas Sektor Pariwisata Yang Terbukti Berhasil Dan Jadi Role Model Nasional, Serta Dukungan Bagi Umkm, Ekonomi Kreatif, Pelaku Usaha Dan Sektor Riil;
7. Percepatan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Yang Akan Menciptakan Multiplier Effect dan Lapangan Kerja Yang Luas;
8. Memperbanyak Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Rumahsakit Umum Daerah Di Tiap Kabupaten Kota, Serta Peningkatan Kapasitas Tenaga Medis;
9. Iklim Investasi & Usaha Yang Makin Kondusif Dengan Kemudahan Regulasi dan Sistem Perizinan Yang Tetap Berpihak Pada Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Percepatan Transformasi Digital Dalam Pelayanan Publik, Regulasi Yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Digital Serta Dukungan Pembiayaan Ekosistem Digital Agar Sulut Lebih Maju Sebagai Smart Province Gkungan Hidup & Pembangunan Berkelanjutan.

Dengan memperhatikan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan yang dibutuhkan oleh Provinsi Sulawesi Utara dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Tahun 2021 - 2026, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Manajemen Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Lebih Transparan Dan Akuntabel Melalui Teknologi Informasi Dengan Tranformasi Digital dan Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

Untuk mewujudkan Misi 5 (lima) tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai **Strategi Pembangunan sebagai berikut :**



GAMBAR BAB 2.26

Reformasi birokrasi yang mencakup tata kelola pemerintahan sangat berkaitan erat dengan aspek pelayanan kepada masyarakat. Efektifitas dan efisiensi birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat harus bisa diterapkan di setiap sendi pelayanan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan ASN yang professional, penerapan Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik (*e-government*), Pelaksanaan Pelayanan Terpadu kepada masyarakat, peningkatan inovasi pelayanan public serta peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah. Selain itu, perlu mendorong tercapainya sinergitas antar daerah, yakni antara Pemerintah Provinsi dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota serta antarpemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara. Sinergitas antar daerah yang terjalin dengan baik akan memudahkan pencapaian target pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Beberapa strategi yang diperlukan untuk pencapaian pembangunan misi ini antara lain:

- a. Percepatan penerapan reformasi birokrasi
- b. Mendorong inovasi pelayanan publik pada setiap Perangkat Daerah dan tata kelola perencanaan dan keuangan daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- c. Mendorong peningkatan kerjasama pembangunan dan sinergitas antar daerah serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
- d. Mendorong sinergitas program antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

dan **Arah Kebijakan** sebagai berikut :

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SULAWESI UTARA TAHUN 2021 - 2026	
Tahun 2022	Mempercepat Pemulihan ekonomi daerah melalui reformasi sosial, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur
Tahun 2023	Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Pembangunan SDM dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan
Tahun 2024	Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Pembangunan SDM dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan
Tahun 2025	Sulawesi Utara sebagai Super Hub di Kawasan Timur Indonesia
Tahun 2026	Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik

GAMBAR BAB 2.27

1. Arah Kebijakan Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun pertama periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2022 – 2026. Dengan asumsi bahwa pandemic *COVID-19* telah mulai dapat dikendalikan, maka Arah Kebijakan untuk Tahun 2022 difokuskan pada “Mempercepat Pemulihan ekonomi daerah melalui reformasi sosial, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur”. Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 diarahkan pada:

- a. Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dampak Pandemi Covid19;
- b. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
- c. Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran;
- d. Adaptasi Lingkungan dan Mitigasi Bencana;
- e. Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- f. Penguatan UMKM dan Industri Pengolahan;
- g. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Sosial; dan
- h. Memperkuat stabilitas Trantibmas dan Transformasi Pelayanan Publik.

2. Arah Kebijakan Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dalam periode 2021 – 2026. Arah Kebijakan di Tahun 2023 ini diarahkan pada “Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Pembangunan SDM dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan”. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 adalah:

- a. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- b. Peningkatan Kualitas SDM;
- c. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah;

- d. Pembangunan Infrastruktur dan konektivitas yang berkualitas;
- e. Pembangunan Kepariwisata;
- f. Penanggulangan Bencana dan Mitigasi Perubahan Iklim;
- g. Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan; dan
- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

3. Arah Kebijakan Tahun 2024

Arah Kebijakan Pada Tahun 2024 difokuskan pada “Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata dan berwawasan lingkungan serta suksesnya pelaksanaan Pemilu”. Pada tahun ini akan dilaksanakan salah satu agenda nasional, yakni Pemilihan Umum (Pemilihan Presiden dan Legislatif serta Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak), sehingga diperlukan stabilitas daerah yang baik untuk melaksanakan agenda nasional dimaksud. Adapun prioritas pembangunan daerah tahun 2024 adalah:

- a. Pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- b. Pemerataan Pembangunan;
- c. Penanggulangan Kemiskinan;
- d. Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata;
- e. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;
- f. Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah; dan
- g. Stabilitas Daerah yang terjamin.

4. Arah Kebijakan Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun ke empat dari periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2021 – 2026. Tahun ini juga sekaligus sebagai akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Periode 2005 – 2025. Oleh karena itu maka Arah kebijakan Pembangunan Daerah pada tahun 2025 ini difokuskan pada “Sulawesi Utara sebagai Super Hub di Kawasan Timur Indonesia”. Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 diarahkan pada:

- a. Pemerataan Pembangunan yang berkualitas dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan;
- b. Penguatan kapasitas SDM Sulawesi Utara;
- c. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;
- d. Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah;
- e. Penanggulangan Kemiskinan;
- f. Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata;
- g. Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan; dan
- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

5. Arah Kebijakan Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan tahun terakhir periode 2021 – 2026. Pada tahun ini diharapkan semua target capaian yang telah ditetapkan dapat dipenuhi. Untuk itu, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2026 berfokus pada “Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik”. Diharapkan bahwa di tahun ini Sulawesi Utara benar-benar telah layak disebut sebagai Pintu Gerbang NKRI di Kawasan Asia Pasifik.

Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 meliputi:

- a. Pemerataan Pembangunan yang berkualitas dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan;
- b. Penguatan kapasitas SDM Sulawesi Utara;
- c. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;
- d. Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah;
- e. Penanggulangan Kemiskinan;
- f. Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata;
- g. Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan; dan
- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Renstra Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan sasaran rencana strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2020-2024 dan Badan Keuangan dan Aset Provinsi Sulawesi Utara diperoleh keterkaitan sebagai berikut:

TUJUAN		
KEMENTERIAN DALAM NEGERI	KEMENTERIAN KEUANGAN	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PRVINSI SULAWESI UTARA
Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	1 Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.	Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Manajemen Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Lebih Transparan Dan Akuntabel Melalui Teknologi Informasi Dengan Tranformasi Digital
	2 Penerimaan negara yang optimal	
	3 Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.	
	4 Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.	
	5 Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.	
Sumber Data		
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024	Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024	Rencana Strategis BKAD Tahun 2021-2026

SASARAN STRATEGIS		
KEMENTERIAN DALAM NEGERI	KEMENTERIAN KEUANGAN	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PRVINSI SULAWESI UTARA
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
Sumber Data		
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024	Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024	Rencana Strategis BKAD Tahun 2021-2026

INDIKATOR		
KEMENTERIAN DALAM NEGERI	KEMENTERIAN KEUANGAN	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PRVINSI SULAWESI UTARA
Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Sumber Data		
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020	Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024	Rencana Strategis BKAD Tahun 2021-2026

Sesuai dengan ketugasan atau kewenangannya, maka Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara memberi dukungan dan mewujudkan misi 5 (lima) yaitu Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Didukung Oleh Sinergitas Antar Daerah dengan tujuan Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan serta dengan indikator Opini BPK (WTP).

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Aspek Lingkungan Hidup Perencanaan pembangunan jangka menengah harus menjamin keberlangsungan lingkungan hidup daerah atau menjamin pembangunan berkelanjutan. Beberapa masalah yang diangkat dalam aspek ini :

- a) Rendahnya Tutupan Lahan, khususnya di kawasan perkotaan;
- b) Tingginya perambahan hutan;
- c) Meningkatnya intensitas kejadian banjir dan longsor;
- d) Tingginya pencemaran air permukaan; Belum optimalnya Pengelolaan sampah;
- f) Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 dan Medis;
- g) Belum optimalnya pengelolaan drainase.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah untuk mencapai tujuan yang diinginkan daerah. Upaya mencapai visi dan misi RPJPD Provinsi Sulawesi Utara melalui pelaksanaan RPJMD 2021-2026 tidak terlepas dari berbagai isu eksternal dan internal yang ikut mempengaruhi perekonomian daerah.

3.5.1 Isu Internasional

- a. Menangani Pandemi *COVID-19* dan mengembangkan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*); Ketika *COVID-19* mendapatkan status sebagai pandemic, secara langsung telah merubah wajah dunia dan pola hidup global dari keadaan “normal” ke “*new normal*”. Penciptaan pra kondisi ini menyasar enam kriteria yang relevan dengan kesehatan publik, yaitu transmisi penyebaran terkontrol, kapasitas fasilitas kesehatan memadai, risiko perluasan pandemi minimal, standar pencegahan terpenuhi di ruang-ruang publik, risiko penyebaran terkendali, serta publik teredukasi, terlibat, dan diberdayakan optimal. Dengan demikian, lapisan infrastruktur dasar sebagai prakondisi menuju kenormalan baru dibangun untuk pemenuhan syarat-syarat tersebut. Perkembangan terkini tentang

pandemi ini adalah pengembangan/pengadaan vaksin. Poin penting adalah bahwa keterdesakan yang mendorong pengembangan vaksin harus sama dengan keterdesakan distribusi vaksin dan vaksinasi secara adil dan merata untuk “*herd immunity*” atau “kekebalan kelompok”, namun tetap menerapkan Protokol Kesehatan berkelanjutan.

- b. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals*; Pencanangan TPB dilaksanakan oleh Sidang Umum PBB yang dicetuskan tanggal 21 Oktober 2015 yang secara umum dikenal dengan “Agenda 2030”. TPB mencakup 1) Tanpa kemiskinan; 2) Tanpa kelaparan; 3) Kehidupan sehat dan sejahtera; 4) Pendidikan berkualitas; 5) Kesenjangan gender; 6) Air bersih dan sanitasi layak; 8) Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi; 9) Industri, inovasi dan infrastruktur; 10) Berkurangnya kesenjangan; 11) Kota dan komunitas berkelanjutan; 12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; 13) Penanganan perubahan iklim; 15) Ekosistem daratan; 16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh; 17) Kemitraan untuk mencapai tujuan.

- c. Konvensi Global Perubahan Iklim;

United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) merupakan sebuah perjanjian internasional tentang lingkungan, secara khusus menyangkut perubahan iklim. Tujuannya menyoal usaha stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer sampai pada level yang akan mencegah intervensi manusia yang membahayakan dengan sistem iklim bumi. Level tersebut haruslah dicapai dalam rentang waktu yang cukup untuk membiarkan ekosistem beradaptasi secara natural terhadap perubahan iklim, untuk menjamin bahwa produksi pangan tidak terancam, dan untuk memberdayakan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka mengusung keseimbangan pilar-pilar keberlanjutan (*sustainability pillars*): ekonomi, lingkungan dan sosial, maka Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen nyata pembangunan berkelanjutan melalui pembangunan rendah karbon (PRK) - *Low Carbon Development* Indonesia (LCDI). LCDI merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan beremisi gas rumah kaca (GRK) rendah dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam (SDA). dan untuk itu Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan PRK-LCDI

kedalam RPJMN 2020-2024. Sulawesi Utara sejak tahun 2016 telah menjadi percontohan pembangunan rendah karbon di Kawasan Masyarakat *Ekonomi Asia Pasifik Asia Pacific Economy Community* (APEC) *Energy Working Group* (EWG) dikenal dengan *Low Carbon Model Town* (LCMT) yaitu Kota Model Rendah Karbon di Kawasan Ekonomi Khusus Bitung.

d. Perang dagang

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China merupakan perselisihan dagang antara dua negara dengan ekonomi terbesar. Perselisihan ini telah menyaksikan bagaimana AS dan China saling membebaskan tarif sebesar ratusan miliar dolar terhadap barang yang diperdagangkan kedua negara tersebut. Secara khusus, kondisi ini mempengaruhi pelaku ekonomi di kedua negara dan tentunya perkembangan ekonomi keduanya. Secara global, kemandekan ekonomi akibat perang dagang ini mempengaruhi kondisi perdagangan negara-negara yang berhubungan dengan dinamika ekonomi kedua negara tersebut.

e. Industri 4.0

Term *Industrie 4.0*. mencakup seluruh mata rantai dari produsen ke pengguna dan semua fungsi dan jasa suatu bisnis. Tujuannya adalah menghasilkan produk cerdas yang melampaui proses manufaktur dan menjangkau semua data sepanjang masa berlakunya. Industri 4.0 adalah spesialisasi *internet of things* yang diaplikasikan dalam lingkungan industri manufaktur. Industri ini akan mengarah ke proses koleksi data yang masif dan keamanan digital. Sembilan pilar *Industrie 4.0* mencakup *big data* dan analisis data, utilisasi robot, simulasi, sistem terintegrasi, *internet of things*, keamanan digital dan sistem siber-fisik, *cloud*, proses manufaktur aditif, realitas berimbu. *Industrie 4.0* ini secara global kemudian diseimbangkan dengan *society 5.0* yang menjamin peran yang berkelanjutan dari manusia dalam perkembangan industri global. *Society 5.0* juga menjamin tujuan akhir pengembangan industri terhadap kesejahteraan masyarakat dan pemeliharaan lingkungan global.

3.5.2 Isu Nasional

Proses perencanaan dari atas ke bawah (*top down*) mengharuskan daerah untuk mengangkat isu strategis nasional terutama yang berkaitan dengan Provinsi Sulawesi Utara ke dalam perencanaan lima tahun kedepan, diantaranya :

- a) Implementasi *Online Single Submission* (OSS);
- b) Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja;
- c) Transformasi Ekonomi dalam rangka mengubah struktur perekonomian daerah;
- d) Konvergensi Penanganan Stunting;
- e) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
- f) Penguatan Struktur Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- g) Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim;
- h) Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
- i) Kota Layak Huni;
- j) Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM) Manado;
- k) Pengembangan Super Hub di Sulut sebagai pintu gerbang untuk kawasan Asia Pasifik;
- l) Kebijakan pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Likupang;
- m) Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan;
- n) Pengarusutamaan Gender;
- o) Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya;
- p) Pengarusutamaan Transformasi Digital

3.5.3 Isu Strategis Pembangunan Sulawesi Utara 2021-2026

Berdasarkan hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, juga isu-isu global dan nasional, maka telah diidentifikasi isu-isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah Sulawesi Utara untuk lima tahun mendatang, yaitu:

- a) Perwujudan Sulut sebagai *Super Hub* di Indonesia Timur;
- b) Pengembangan kawasan perbatasan dan kepulauan;
- c) Penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- d) Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
- e) Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja;
- f) Peningkatan daya saing dan kemudahan berinvestasi;
- g) Perwujudan kedaulatan pangan;
- h) Optimalisasi sumberdaya perikanan dan kemaritiman serta pemanfaatan yang berkelanjutan;
- i) Optimalisasi pendapatan daerah;
- j) Pemerataan infrastruktur, sanitasi dan air minum layak;
- k) Peningkatan moda transportasi dari pusat-pusat produksi;
- l) Penguatan kepariwisataan terutama Manado – Likupang yang menjadi

bagian dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas dan penetapan KEK Pariwisata Likupang;

- m) Peningkatan industri dan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi;
- n) Perencanaan pembangunan berdasarkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- o) Optimalisasi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
- p) Transformasi energi terpadu dan berkelanjutan;
- q) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
- r) Perencanaan pembangunan rendah karbon/ *Low Carbon Development* Indonesia (LCDI);
- s) Transformasi Digital;
- t) Peningkatan pemajuan kebudayaan dan pelestarian nilai budaya.

BAB IV**TUJUAN DAN SASARAN**

Selaras dengan salah satu misi Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dalam RPJMD yaitu **Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Didukung Oleh Sinergitas Antar Daerah** dan Tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah “Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Manajemen Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Lebih Transparan Dan Akuntabel Melalui Teknologi Informasi Dengan Transformasi Digital” maka Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah “Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah”.

Tujuan dan sasaran tersebut berdasarkan kewajiban Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai institusi pengelola keuangan daerah, sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan indikator tujuan/sasaran :

- 1. Opini Laporan Keuangan dengan target 5 (lima) tahun adalah dengan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);**
- 2. Jumlah Dokumen Manajemen Aset dengan target 5 (lima) tahun adalah tersedianya 4 Dokumen Aset Daerah.**

Tabel T-C.25.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Tahun Dasar (2021)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih transparan dan akuntabel melalui teknologi informasi dengan tranformasi digital	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79,32	79,32	79,52	79,65	79,70	79,95

BAB V**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi yang tepat dalam mencapai tujuan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mewujudkan visi mewujudkan **Sulawesi Utara Maju Dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia Ke Asia Pasifik** dan misi 5 (lima) **Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Didukung Oleh Sinergitas Antara Daerah**, dengan langkah strategis RPJMD adalah **“Mendorong Inovasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Perencanaan dan Keuangan Daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”** untuk itu Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara merumuskan langkah **strategis Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah “Pengelolaan Sistem Keuangan Dan Aset Daerah Yang Lebih Transparan Dan Akuntabel Melalui Teknologi Informasi Dengan Tranformasi Digital”** dengan **Arah Kebijakan** Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah, dengan Kebijakan antara lain :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan;
2. Penguatan regulasi kebijakan dala tata kelola keuangan daerah;
3. Penyusunan, pelaksanaan, pelaporan serta pertanggungjawaban APBD yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan;
4. Pengelolaan keuangan berbasis elektronik;
5. Peningkatan sinergitas antar kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan daerah.

TABEL T-C.26.
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RPJMD 2021-2026
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

VISI : MEWUJUDKAN SULAWESI UTARA MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI PINTU GERBANG INDONESIA KE ASIA PASIFIK				
MISI V : PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH DIDUKUNG OLEH SINERGITAS ANTARA DAERAH				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Manajemen Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Lebih Transparan Dan Akuntabel Melalui Teknologi Informasi Dengan Tranformasi Digital.	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.	Pengelolaan Sistem Keuangan Dan Aset Daerah Yang Lebih Transparan Dan Akuntabel Melalui Teknologi Informasi Dengan Tranformasi Digital.	Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah , Arah Kebijakan antara lain :
				1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan,
				2 Penguatan regulasi kebijakan dala tata kelola keuangan daerah,
				3 Penyusunan, pelaksanaan, pelaporan serta pertanggungjawaban APBD yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan,
				4 Pengelolaan keuangan berbasis elektronik,
5 Peningkatan sinergitas antar kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan daerah				

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2021 - 2026, dimana didalamnya disebutkan bahwa Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dalam lima tahun kedepan adalah **“Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik ”**, hal ini ditindaklanjuti dengan melaksanakan tujuh misi pembangunan dimana peran Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah berada dalam Misi kelima dari RPJMD yakni ***Mewujudkan Pemerintah yang baik dan bersih didukung oleh Sinergitas antar daerah.*** Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan program prioritas RPJMD Provinsi Sulawesi Utara yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Rencana program prioritas beserta indikator kinerja program dan pagu anggaran dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan kedalam dokumen rencana kegiatan dan sub kegiatan Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan dan sub kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Indikator kinerja program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang pada prinsipnya berisi outcome program.

Sesuai dengan amanat Pemerintah Provinsi No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada awal tahun 2016 telah mengimplementasikan *Accrual Basis Accounting* untuk pengelolaan keuangan di daerah. SAP berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Tabel T-C.27 yang menyajikan gambaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Periode Renstra 2021 - 2026 Tabel T-C.27 dibawah ini dan terlampir pada dokumen Renstra Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 - 2026.

Tahun 2021 - 2026 Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah merencanakan melaksanakan 3 program yaitu Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**, Ke-3 program tersebut merupakan program yang secara rutin dilaksanakan Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam upaya melaksanakan tugas, pokok, tata kerja, dan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang merupakan program utama/inti maupun program pendukung/program penunjang. Program utama atau inti adalah program yang dilaksanakan terkait secara langsung dalam pencapaian indikator kinerja Opini Laporan Keuangan dan Jumlah Dokumen Manajemen Aset. Sedang program pendukung/penunjang adalah sebagai program operasional yang menunjang terlaksananya tugas, pokok, dan tata kerja Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja yaitu Indeks Nilai LKIP Perangkat Daerah. Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat nilai yang lebih besar karena merupakan program utama atau inti dengan Indikator Tujuan/Sasaran adalah **Opini Laporan Keuangan dan Jumlah Dokumen Manajemen Aset** sehingga dapat mewujudkan Misi Kelima yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi birokrasi serta sinergitas antar daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, sasarannya adalah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan.

PEMETAAN RENSTRA PEMUTAKHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KEPENDAGRI 050-5889/2021 PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMETAAN RENSTRA PEMUTAKHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KEPENDAGRI 050-5889/2021													
KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2023		2024		2025		2026	
						TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
5.02	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	57.015.897.124,72	100%	59.384.381.197,80	100%	61.126.810.721,22	100%	61.909.439.368,07
		xxx1101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	82.086.525,72	100%	84.963.795,22	100%	87.512.707,80	100%	90.138.089,62
xxx1101		xxx11011		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6.099.479,72	Dokumen	6.470.937,27	Dokumen	6.665.065,00	Dokumen	6.865.017,35
xxx1102		xxx11012		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	6.060.071,00	1 2 Dokumen	6.429.129,32	Dokumen	6.622.003,24	Dokumen	6.820.663,37
xxx1103		xxx11013		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3.250.302,00	1 Dokumen	3.448.246,25	Dokumen	3.551.692,75	Dokumen	3.658.243,64
xxx1104		xxx11014		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3.249.701,00	1 Dokumen	3.447.607,79	Dokumen	3.551.036,00	Dokumen	3.657.567,11
xxx1104		xxx11015		Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	3.250.498,00	1 Dokumen	3.448.453,32	Dokumen	3.551.906,90	Dokumen	3.658.464,14
xxx1105		xxx11016		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3.176.811,00	Laporan	3.370.278,79	Laporan	3.471.387,15	Laporan	3.575.528,77
xxx1106		xxx11017		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	56.999.663,00	Laporan	58.349.142,48	Laporan	60.099.616,75	Laporan	61.902.605,25
		xxx1102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	51.801.027.495,00	100%	52.613.387.818,59	100%	54.152.684.481,92	100%	54.726.089.310,10
xxx11021		xxx11021		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang	51.500.000.000,00	115 Orang	52.294.027.749,15	115 Orang	53.823.743.581,39	115 Orang	54.387.280.212,42
xxx11022		xxx11022		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	258.977.719,00	1 Dokumen	293.315.212,09	1 Dokumen	302.114.667,45	1 Dokumen	311.178.108,50
xxx11023		xxx11023		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	10.000.000,00	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-
xxx11024		xxx11024		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	7.500.000,00	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-
xxx11025		xxx11025		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.249.974,00	1 Laporan	3.447.897,42	1 Laporan	3.551.334,34	1 Laporan	3.657.874,37
xxx11026		xxx11026		Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	14.999.961,00	1 Dokumen	15.913.458,62	1 Dokumen	16.390.862,38	1 Dokumen	16.882.588,26
xxx11027		xxx11027		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	3.150.035,00	1 Dokumen	3.341.872,13	1 Dokumen	3.442.128,30	1 Dokumen	3.545.392,14
xxx11028		xxx11028		Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	3.149.806,00	1 Laporan	3.341.629,19	1 Laporan	3.441.878,06	1 Laporan	3.545.134,40
		xxx1103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	46.400.287,00	100%	48.165.164,48	100%	49.610.119,41	100%	51.098.423,00
		xxx11031		Penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	6.991.989,00	1 Dokumen	7.417.801,13	1 Dokumen	7.640.335,16	1 Dokumen	7.869.545,22
		xxx11032		Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	14.960.000,00	1 Laporan	15.871.064,00	1 Laporan	16.347.195,92	1 Laporan	16.837.611,80
		xxx11033		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	3.000.000,00	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-
		xxx11034		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3.000.000,00	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-

PEMETAAN RENSTRA PEMUTAKHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KEMENDAGRI 050-5889/2021 PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMUTAKHIRAN KEMENDAGRI 050-5889/2021																	
KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	2023	PAGU (Rp.)	TARGET	2024	PAGU (Rp.)	TARGET	2025	PAGU (Rp.)	TARGET	2026	PAGU (Rp.)
5.02	KEUANGAN																
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%		57.015.597.124,72	100%		59.384.351.197,60	100%		61.126.810.721,22	100%		61.909.439.368,07
		xxxx11035		Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		3.448.500,00	1 Laporan		3.658.513,65	1 Laporan		3.768.269,06	1 Laporan		3.881.317,13
		xxxx11036		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		13.999.798,00	1 Laporan		21.217.785,70	1 Laporan		21.854.319,27	1 Laporan		22.509.948,85
		xxxx11037		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1.000.000,00	Dokumen		-	Dokumen		-	Dokumen		-
		xxx1105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		900.582.190,00	100%		955.427.645,37	100%		984.090.474,73	100%		1.013.613.188,97
		xxxx11051		Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit		55.000.037,00	Unit		58.349.539,25	Unit		60.100.025,43	Unit		61.903.026,19
		xxxx11052		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket		399.300.000,00	Paket		423.617.370,00	Paket		436.325.891,10	Paket		449.415.667,83
		xxxx11053		Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		156.232.897,00	Dokumen		165.747.480,43	Dokumen		170.719.904,84	Dokumen		175.841.501,99
		xxxx11054		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		-									
		xxxx11055		Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		-									
		xxxx11056		Pemulangan Pegawai yang Penilaian	Jumlah Pegawai Penilaian yang Dipulangkan	Orang		-									
		xxxx11057		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan		-									
		xxxx11058		Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindah-tugaskan	Orang		-									
		xxxx11059		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		-									
		xxxx110510		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		-									
		xxxx110511		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	145 Orang		290.049.256,00	145 Orang		307.713.255,69	145 Orang		316.944.653,36	145 Orang		326.452.992,96
		xxx1106	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		1.169.585.951,00	100%		1.240.813.735,42	100%		1.278.038.147,48	100%		1.316.379.291,90
		xxxx11061		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		136.532.319,00	Paket		144.847.137,23	Paket		149.192.551,34	Paket		153.668.327,88
		xxxx11062		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket		-									
		xxxx11063		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		246.476.063,00	Paket		261.486.455,24	Paket		269.331.048,89	Paket		277.410.980,36
		xxxx11064		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		-									
		xxxx11065		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		-									
		xxxx11066		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		-									
		xxxx11067		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		-									
		xxxx11068		Facilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laoran Fasilitas Kunjungan Tamu	Laoran		174.075.000,00	Laoran		184.676.167,50	Laoran		190.216.452,53	Laoran		195.922.946,10
		xxxx11069		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		411.504.329,00	Laporan		436.564.942,64	Laporan		449.661.890,92	Laporan		463.151.747,64
		xxxx110610		Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		120.855.846,00	Dokumen		128.215.967,02	Dokumen		132.062.446,03	Dokumen		136.024.319,41

PEMETAAN RENSTRA PEMUTAKHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KEMENDAGRI 050-5889/2021 PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMUTAKHIRAN KEMENDAGRI 050-5889/2021													
KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2023		2024		2025		2026	
						TARGET	PAGU (Rp.)						
5.02	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	87.015.597.124,72	100%	89.384.381.197,80	100%	61.126.810.721,22	100%	61.909.439.368,07
		xxxx110611		Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	80.142.394,00	Dokumen	85.023.065,79	Dokumen	87.573.757,77	Dokumen	90.200.970,50
		xxx1107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit/Paket	992.825.638,00	Unit/Paket	2.292.148.178,31	Unit/Paket	2.360.912.623,66	Unit/Paket	2.431.740.002,37
		xxxx11071		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	478.256.143,00	Unit	-	Unit	-	Unit	-
		xxxx11072		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	325.000.000,00	Unit	1.039.682.000,00	Unit	1.070.872.460,00	Unit	1.102.998.633,80
		xxxx11073		Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	1.500.000,00	Unit	-	Unit	-	Unit	-
		xxxx11074		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	1.500.000,00	Unit	-	Unit	-	Unit	-
		xxxx11075		Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	45.000.000,00	Paket	47.740.501,06	Paket	49.172.716,09	Paket	50.647.897,58
		xxxx11076		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	104.769.495,00	Unit	1.204.725.677,25	Unit	1.240.867.447,56	Unit	1.278.093.470,99
		xxxx11077		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1.500.000,00	Unit	-	Unit	-	Unit	-
		xxxx11078		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	30.800.000,00	Unit	-	Unit	-	Unit	-
		xxxx11079		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1.500.000,00	Unit	-	Unit	-	Unit	-
		xxxx110710		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1.500.000,00	Unit	-	Unit	-	Unit	-
		xxxx110711		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1.500.000,00	Unit	-	Unit	-	Unit	-
		xxx1108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.088.190.329,00	100%	1.152.306.320,04	100%	1.186.909.499,64	100%	1.222.516.784,63
		xxx11081		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	122.771.165,00	Laporan	130.214.928,95	Laporan	134.155.366,82	Laporan	138.180.027,82
		xxx11082		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	515.400.000,00	Laporan	651.816.960,00	Laporan	671.371.468,80	Laporan	691.512.612,86
		xxx11083		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	100.000.000,00	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-
		xxx11084		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	350.019.164,00	Laporan	370.274.431,09	Laporan	381.382.664,02	Laporan	392.824.143,94
		xxxx1109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terlaksananya Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	929.898.709,00	100%	997.138.540,38	100%	1.027.052.696,99	100%	1.057.864.277,49
		xxxx11091		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	403.905.000,00	Unit	490.035.014,50	Unit	504.736.064,94	Unit	519.878.146,88
		xxxx11092		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10.000.000,00	Unit	-	Unit	-	Unit	-

PEMETAAN RENSTRA PEMUTAKHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KEMENDAGRI 050-5889/2021 PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMUTAKHIRAN KEMENDAGRI 050-5889/2021													
KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2023	2024	2025	2026				
						TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
5.02	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	57.015.597.124,72	100%	59.384.351.197,80	100%	61.126.810.721,22	100%	61.909.439.368,07
		xxxx11093		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	10.000.000,00	Unit	-	Unit	-	Unit	-
		xxxx11094		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	10.000.000,00	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-
		xxxx11095		Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	66.000.000,00	Unit	70.019.400,00	Unit	72.119.982,00	Unit	74.283.581,46
		xxxx11096		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	154.500.000,00	Unit	169.213.550,00	Unit	174.289.956,50	Unit	179.518.655,20
		xxxx11097		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	2.500.000,00	Unit	-	Unit	-	Unit	-
		xxxx11098		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2.500.000,00	Unit	-	Unit	-	Unit	-
		xxxx11099		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10.000.000,00	Unit	-	Unit	-	Unit	-
		xxxx110910		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10.000.000,00	Unit	-	Unit	-	Unit	-
		xxxx110911		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	250.493.709,00	Unit	267.870.575,88	Unit	275.906.693,15	Unit	284.183.893,95
		xxxx110912		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tana yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	-	Ha	-	Ha	-	Ha	-
		xx1110	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		5.000.000,00						
		xx11101		Pelayanan dan Penunjang BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	5.000.000,00						
522		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	458.355.089.116,08	WTP OPINI	477.397.781.625,07	WTP OPINI	491.405.618.036,00	WTP OPINI	497.697.262.322,53
522101			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan, Penyusunan dan Anggaran Daerah	WTP OPINI	1.674.318.648,67	WTP OPINI	1.674.318.649,61	WTP OPINI	1.776.284.655,08	WTP OPINI	1.829.573.193,62
5221011				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	253.643.493,00	2 Dokumen	261.252.798,38	2 Dokumen	269.090.383,12	2 Dokumen	277.163.093,80
5221012				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	115.837.492,52	2 Dokumen	119.312.616,27	2 Dokumen	122.891.994,76	2 Dokumen	126.578.753,90
5221013				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKASKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	88.385.344,08	1 Dokumen	91.036.905,75	1 Dokumen	93.768.011,90	1 Dokumen	96.581.052,36
5221014				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	90.941.043,25	1 Dokumen	93.669.274,06	1 Dokumen	96.479.352,78	1 Dokumen	99.373.733,47
5221015				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPASKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	42.108.732,95	1 Dokumen	43.371.994,94	1 Dokumen	44.673.154,79	1 Dokumen	46.013.349,43
5221016				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	42.552.044,95	1 Dokumen	43.828.606,30	1 Dokumen	45.143.464,49	1 Dokumen	46.497.768,62
5221017				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	251.657.544,39	2 Dokumen	234.207.270,72	2 Dokumen	266.983.488,84	2 Dokumen	274.992.993,51
5221018				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	253.851.045,78	2 Dokumen	261.466.577,15	2 Dokumen	269.310.574,47	2 Dokumen	277.389.891,70
5221019				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	184.175.598,83	3 Dokumen	164.700.866,79	3 Dokumen	195.391.892,80	3 Dokumen	201.253.649,58

PEMETAAN RENSTRA PEMUTAKHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KEPENDAGRI 050-5889/2021 PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMUTAKHIRAN KEPENDAGRI 050-5889/2021													
KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2023		2024		2025		2026	
						TARGET	PAGU (Rp.)						
5.02	KEUANGAN												
522		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	458.355.089,116,08	WTP OPINI	477.397.781.625,07	WTP OPINI	491.405.618.610,60	WTP OPINI	497.697.362.322,99
522101			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan, Penyusunan dan Anggaran Daerah	WTP OPINI	1.674.318.648,67	WTP OPINI	1.674.318.649,61	WTP OPINI	1.776.284.655,08	WTP OPINI	1.829.573.193,62
5221011				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	253.643.493,00	2 Dokumen	261.252.798,38	2 Dokumen	269.090.383,12	2 Dokumen	277.163.093,80
5221012				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	115.837.492,52	2 Dokumen	119.312.616,27	2 Dokumen	122.891.994,76	2 Dokumen	126.578.753,90
5221013				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKASKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	88.385.344,08	1 Dokumen	91.036.905,75	1 Dokumen	93.768.011,90	1 Dokumen	96.581.052,36
5221014				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	90.941.043,25	1 Dokumen	93.669.274,06	1 Dokumen	96.479.352,78	1 Dokumen	99.373.733,47
5221015				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPASKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	42.108.732,95	1 Dokumen	43.371.994,94	1 Dokumen	44.673.154,79	1 Dokumen	46.013.349,43
5221016				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	42.552.044,95	1 Dokumen	43.828.606,30	1 Dokumen	45.143.464,49	1 Dokumen	46.497.768,62
5221017				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	251.657.544,39	2 Dokumen	234.207.270,72	2 Dokumen	266.983.488,84	2 Dokumen	274.992.993,51
5221018				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	253.851.045,78	2 Dokumen	261.466.577,15	2 Dokumen	269.310.574,47	2 Dokumen	277.389.891,70
5221019				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	184.175.598,83	3 Dokumen	164.700.866,79	3 Dokumen	195.391.892,80	3 Dokumen	201.253.649,58
52210110				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	62.485.973,82	1 Dokumen	64.360.553,07	1 Dokumen	66.291.369,63	1 Dokumen	68.280.110,71
52210111				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	54.245.251,79	1 Dokumen	55.872.609,34	1 Dokumen	57.548.787,62	1 Dokumen	59.275.251,25
52210112				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	54.245.973,82	1 Dokumen	55.873.353,06	1 Dokumen	57.549.553,63	1 Dokumen	59.276.040,23
52210113				Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	180.189.109,49	Orang	185.365.223,77	Orang	191.162.626,26	Orang	196.897.505,05

PEMETAAN RENSTRA PEMUTAKHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KEPMENDAGRI 050-5889/2021 PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMUTAKHIRAN KEPMENDAGRI 050-5889/2021																	
KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	2023	PAGU (Rp.)	TARGET	2024	PAGU (Rp.)	TARGET	2025	PAGU (Rp.)	TARGET	2026	PAGU (Rp.)
5.02	KEUANGAN																
522		PROGRAM PERGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI		48.355.080.115,00	WTP OPINI		477.397.781.025,07	WTP OPINI		401.405.818.810,00	WTP OPINI		487.697.262.322,42
522102			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan/Dokumen Hasil Evaluasi dan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan/Dokumen/Orang		1.008.280.480,64	Laporan/Dokumen/Orang		1.008.280.480,64	Laporan/Dokumen/Orang		1.069.684.761,91	Laporan/Dokumen/Orang		1.101.775.304,77
5221021				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Embiusi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	1 Laporan		35.446.943,24	1 Laporan		36.510.351,54	1 Laporan		37.605.662,08	1 Laporan		38.733.831,95
5221022				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Embiusi Rancangan Peraturan Rancangan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	15 Laporan		84.737.820,87	15 Laporan		87.279.955,50	15 Laporan		89.898.354,16	15 Laporan		92.595.304,79
5221023				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Embiusi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	15 Laporan		129.401.229,86	15 Laporan		133.283.266,76	15 Laporan		137.281.764,76	15 Laporan		141.400.217,70
5221024				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Embiusi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	15 Laporan		125.941.446,47	15 Laporan		129.719.689,86	15 Laporan		133.611.280,56	15 Laporan		137.619.618,08
5221025				Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Kabupaten / Kota	1 Dokumen		197.758.978,24	1 Dokumen		173.443.333,17	1 Dokumen		209.802.500,01	1 Dokumen		216.096.575,02
5221026				Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	1 Laporan		133.231.990,41	1 Laporan		137.228.950,12	1 Laporan		141.345.818,63	1 Laporan		145.586.193,18
5221027				Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD yang Diastensi	Lembaga		22.757.238,18	Lembaga		23.439.955,33	Lembaga		24.143.153,99	Lembaga		24.867.448,60
5221028				Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Embiusi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	15 Dokumen		27.691.171,99	15 Dokumen		28.521.907,15	15 Dokumen		29.377.564,36	15 Dokumen		30.258.891,30
5221029				Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan dan Embiusi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Penyusunan dan Embiusi Rancangan Peraturan Pembinaan Penyusunan dan Embiusi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	15 Dokumen		16.731.310,73	15 Dokumen		17.233.250,05	15 Dokumen		17.750.247,58	15 Dokumen		18.282.754,98
52210210				Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Embiusi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	15 Dokumen		16.731.100,61	15 Dokumen		17.233.033,63	15 Dokumen		17.750.024,64	15 Dokumen		18.282.525,38
52210211				Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Orang		105.592.778,83	Orang		108.760.562,19	Orang		112.023.379,06	Orang		115.384.080,43
52210212				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	15 Dokumen		112.258.471,21	15 Dokumen		115.626.225,35	15 Dokumen		119.095.012,11	15 Dokumen		122.667.862,47

PEMETAAN RENSTRA PEMUTAKHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KEMENDAGRI 050-5889/2021 PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PEMUTAKHIRAN KEMENDAGRI 050-5889/2021							
						TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
5.02	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	49.697.262.122,00	WTP OPINI	47.397.782,00	WTP OPINI	60.405.618.600,00	WTP OPINI	49.697.262.122,00
522103			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah Laporan/Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Laporan/Dokumen/Orang	14.743.263.375,11	Laporan/Dokumen/Orang	14.743.263.375,36	Laporan/Dokumen/Orang	15.641.128.114,65	Laporan/Dokumen/Orang	16.110.361.958,09
5221031				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Daerah Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	636.722.471,71	1 Dokumen	655.824.145,86	1 Dokumen	675.498.870,24	1 Dokumen	695.763.836,34
5221032				Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	10.300.000,00	1 Laporan	10.609.000,00	1 Laporan	10.927.270,00	1 Laporan	11.255.088,10
5221033				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12 Laporan	183.390.071,39	12 Laporan	188.891.773,53	12 Laporan	194.558.526,74	12 Laporan	200.395.282,54
5221034				Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	49.703.680,00	1 Dokumen	51.194.790,40	1 Dokumen	52.730.634,11	1 Dokumen	54.312.553,14
5221035				Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	206.201.919,14	1 Dokumen	212.387.976,71	1 Dokumen	218.759.616,02	1 Dokumen	225.322.404,50
5221036				Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	129.167.212,83	1 Dokumen	133.042.229,21	1 Dokumen	137.033.496,09	1 Dokumen	141.144.500,97
5221037				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	1 Dokumen	12.970.526.399,31	1 Dokumen	12.917.344.290,29	1 Dokumen	13.760.431.457,03	1 Dokumen	14.173.244.400,74
5221038				Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Laporan	10.300.000,00	1 Laporan	10.609.000,00	1 Laporan	10.927.270,00	1 Laporan	11.255.088,10
5221039				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SPD dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SPD dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	173.672.217,09	1 Dokumen	178.882.383,60	1 Dokumen	184.248.855,11	1 Dokumen	189.776.320,76
52210310				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	362.979.403,64	1 Dokumen	373.868.785,75	1 Dokumen	385.084.849,32	1 Dokumen	396.637.394,80
52210311				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	10.300.000,00	1 Laporan	10.609.000,00	1 Laporan	10.927.270,00	1 Laporan	11.255.088,10

PEMETAAN RENSTRA PEMUTAKHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KEMENDAGRI 050-5889/2021 PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMUTAKHIRAN KEMENDAGRI 050-5889/2021													
KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2023		2024		2025		2026	
						TARGET	PAGU (Rp.)						
5.02	KEUANGAN												
522		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	458.355.089,116,00	WTP OPINI	477.397.761.625,00	WTP OPINI	491.465.618.610,00	WTP OPINI	497.697.262.322,00
522104			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Jumlah Laporan/Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan	Laporan/Dokumen/Orang	1.671.609.436,49	Laporan/Dokumen/Orang	1.671.609.435,58	Laporan/Dokumen/Orang	1.773.410.451,17	Laporan/Dokumen/Orang	1.826.612.764,71
5221041				Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2 Laporan	50.057.809,45	2 Laporan	51.559.543,73	2 Laporan	53.106.330,05	2 Laporan	54.699.519,95
5221042				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	10.300.000,00	1 Dokumen	10.609.000,00	1 Dokumen	10.927.270,00	1 Dokumen	11.255.088,10
5221043				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	282.624.790,00	1 Laporan	241.103.533,70	1 Laporan	299.836.639,71	1 Laporan	308.831.738,90
5221044				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	438.412.290,00	2 Laporan	451.416.374,70	2 Laporan	465.111.598,46	2 Laporan	479.064.946,41
5221045				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	496.678.360,00	2 Dokumen	511.578.710,80	2 Dokumen	526.926.072,12	2 Dokumen	542.733.854,29
5221046				Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	10.300.000,00	1 Dokumen	10.609.000,00	1 Dokumen	10.927.270,00	1 Dokumen	11.255.088,10
5221047				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	75.100.700,03	1 Dokumen	77.353.721,03	1 Dokumen	79.674.332,66	1 Dokumen	82.064.562,64
5221048				Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	10.300.000,00	1 Dokumen	10.609.000,00	1 Dokumen	10.927.270,00	1 Dokumen	11.255.088,10
5221049				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	50.469.597,27	1 Dokumen	51.983.685,19	1 Dokumen	53.543.195,74	1 Dokumen	55.149.491,62
52210410				Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	40.359.083,28	1 Dokumen	41.569.855,78	1 Dokumen	42.816.951,45	1 Dokumen	44.101.460,00
52210411				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	29.983.081,64	Orang	30.882.574,09	Orang	31.809.051,31	Orang	32.763.322,85
52210412				Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	Lembaga	177.023.724,82	Lembaga	182.334.436,56	Lembaga	187.804.469,66	Lembaga	193.438.603,75

PEMETAAN RENSTRA PEMUTAKHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KEPENDAGRI 050-5889/2021 PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMUTAKHIRAN KEPENDAGRI 050-5889/2021													
KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2023		2024		2025		2026	
						TARGET	PAGU (Rp.)						
5.02	KEUANGAN												
522		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	458.355.089.116,08	WTP OPINI	477.387.781.625,07	WTP OPINI	491.405.618.610,60	WTP OPINI	497.697.262.322,92
522105			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Laporan/Dokumen Hasil Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan/Dokumen	438.931.944.054,29	Laporan/Dokumen	457.974.636.563,37	Laporan/Dokumen	470.799.604.013,85	Laporan/Dokumen	476.473.067.289,37
5221051				Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	-	1 Dokumen	79.560.970,16	1 Dokumen	81.947.799,27	1 Dokumen	84.406.233,24
5221052				Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	77.243.660,35	1 Laporan	79.560.970,16	1 Laporan	81.947.798,27	1 Laporan	84.406.233,24
5221053				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	107.721.942,30	1 Laporan	110.953.600,07	1 Laporan	114.282.208,59	1 Laporan	117.710.674,84
5221054				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	63.390.249.880,00	1 Laporan	38.355.782.429,85	1 Laporan	39.506.455.902,74	1 Laporan	40.691.649.579,83
5221055				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	1 Laporan	51.500.000,00	1 Laporan	53.045.000,00	1 Laporan	54.636.350,00	1 Laporan	56.275.440,50
5221056				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	1 Laporan	51.500.000,00	1 Laporan	53.045.000,00	1 Laporan	54.636.350,00	1 Laporan	56.275.440,50
5221057				Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1 Laporan	-	1 Laporan	53.045.000,00	1 Laporan	54.636.350,00	1 Laporan	56.275.440,50
5221058				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	66.577.990.986,69	1 Laporan	95.511.505.662,84	1 Laporan	98.376.850.832,73	1 Laporan	101.328.156.357,71
5221059				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	7.239.967.050,72	1 Laporan	7.457.166.062,24	1 Laporan	7.680.881.044,11	1 Laporan	7.911.307.475,43
52210510				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan	301.435.770.534,23	1 Laporan	316.220.971.868,05	1 Laporan	324.793.329.378,15	1 Laporan	326.086.604.413,57

PEMETAAN RENSTRA PEMUTAKHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KEPENDAGRI 050-5889/2021 PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMETAAN RENSTRA PEMUTAKHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KEPENDAGRI 050-5889/2021 PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA													
PEMUTAKHIRAN KEPENDAGRI 050-5889/2021													
KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2023		2024		2025		2026	
						TARGET	PAGU (Rp.)						
5.02	KEUANGAN												
522		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP OPINI	458.355.089.116,08	WTP OPINI	477.397.781.625,07	WTP OPINI	491.405.618.610,60	WTP OPINI	497.697.262.322,92
522106			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan	Laporan/Orang	325.673.120,88	Laporan/Orang	325.673.120,51	Laporan/Orang	345.506.613,94	Laporan/Orang	355.871.812,36
5221061				Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	94.697.837,44	1 Dokumen	97.538.772,56	1 Dokumen	100.464.935,74	1 Dokumen	103.478.883,81
5221062				Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	94.690.112,44	1 Dokumen	97.530.815,81	1 Dokumen	100.456.740,29	1 Dokumen	103.470.442,50
5221063				Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yg Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	136.285.171,00	Orang	130.603.532,13	Orang	144.584.937,91	Orang	148.922.486,05

PEMETAAN RENSTRA PEMUTAKHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KEPENDAGRI 050-5889/2021 PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMUTAKHIRAN KEPENDAGRI 050-5889/2021													
KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	2023		2024		2025		2026	
						TARGET	PAGU (Rp.)						
5.02	KEUANGAN												
523		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET	4 Dokumen Manajemen Aset	2.528.189.966,04	4 Dokumen Manajemen Aset	2.633.225.440,21	4 Dokumen Manajemen Aset	2.710.489.713,60	4 Dokumen Manajemen Aset	2.745.193.092,88
523101			Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan	Laporan/Dokumen/Orang	2.528.189.966,04	Laporan/Dokumen/Orang	2.633.225.440,21	Laporan/Dokumen/Orang	2.710.489.713,60	Laporan/Dokumen/Orang	2.745.193.092,88
5231011				Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Hare:a vane: Disusun	1 Dokumen	242.502.267,75	1 Dokumen	210.777.335,89	1 Dokumen	227.270.655,55	1 Dokumen	259.839.111,64
5231012				Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	51.500.000,00	2 Dokumen	53.045.000,24	2 Dokumen	54.636.350,61	2 Dokumen	56.275.440,50
5231013				Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	132.091.729,04	2 Dokumen	120.054.481,84	2 Dokumen	140.136.116,45	2 Dokumen	144.340.199,78
5231014				Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	82.974.986,60	1 Dokumen	85.464.234,69	1 Dokumen	88.028.161,54	1 Dokumen	90.669.006,59
5231015				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	328.022.732,57	2 Laporan	315.645.412,97	2 Laporan	327.774.775,36	2 Laporan	358.208.018,62
5231016				Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	157.074.317,11	1 Laporan	159.974.324,62	1 Laporan	166.640.143,02	1 Laporan	171.639.347,35
5231017				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	526.694.277,09	1 Laporan	601.495.105,40	1 Laporan	607.039.958,55	1 Laporan	603.351.157,32
5231018				Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	323.419.859,92	1 Laporan	333.122.455,72	1 Laporan	338.807.050,39	1 Laporan	303.409.613,27
5231019				Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	53.614.184,18	1 Laporan	55.222.608,71	1 Laporan	56.879.288,00	1 Laporan	58.585.666,64
52310110				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	155.549.239,06	4 Dokumen	162.875.716,23	4 Dokumen	168.361.987,72	4 Dokumen	154.012.847,35
52310111				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	49.541.057,42	1 Laporan	51.027.289,14	1 Laporan	52.558.107,62	1 Laporan	54.134.851,25
52310112				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	350.021.711,60	2 Laporan	407.082.362,95	2 Laporan	402.594.833,64	2 Laporan	408.572.678,85
52310113				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	75.183.603,70	Orang	77.439.111,81	Orang	79.762.285,17	Orang	82.155.153,72
							517.898.876.206,84		539.415.358.263,08		555.242.919.045,42		562.351.894.783,87

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; serta dengan memperhatikan tujuan, sasaran yang ditetapkan dan data pendukung yang ada.

Indikator kinerja yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara berupa ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sehingga indikator kinerja dimaksud merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai. Selain itu indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dilakukan telah menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 - 2026 dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 - 2026. Penyusunan Rencana Strategis instansi pemerintah khususnya Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan menjadi pedoman dan arah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan Indikator kinerja Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara di bawah ini:

TABEL T-C.28.
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi sd Tahun 2026
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026								
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79,32	79,32	79,52	79,65	79,7	79,95	79,95
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara								
PERENCANAAN DAN KEUANGAN								
2	Rasio belanja pegawai diluar guru dan guru tenaga kesehatan	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
3	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
4	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
MANAJEMEN KEUANGAN								
5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
6	Jumlah Dokumen Manajemen Aset	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
7	Rasio anggaran sisa terhadap total belaja dalam APBD tahun sebelumnya	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
TRASPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK								
8	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan Rencana Strategis jangka menengah sesuai dengan kurun waktu perwujudannya mencakup 5 (lima) tahun kedepan, yaitu mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Sedangkan untuk mewujudkan rencana strategis tersebut telah ditetapkan ke dalam program untuk pelaksanaan selanjutnya akan dituangkan dalam kegiatan dari masing-masing program ke dalam bentuk kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana jangka pendek sesuai dengan indikator-indikator kinerja yang akan direalisasikan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, sebagai Rencana Kerja Tahunan Pertama.

Tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021– 2026 akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan yang berorientasi meningkatkan **Efektifitas Dan Efisiensi Manajemen Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Lebih Transparan Dan Akuntabel Melalui Teknologi Informasi Dengan Transformasi Digital** serta akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diharapkan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan dalam lima tahun kedepan akan lebih sinergis khususnya dengan program/kegiatan pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta para *stakeholder*.

Demikian Rencana Strategis ini disusun. Harapan kami, semoga dengan adanya Rencana Strategis ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi seluruh Perangkat Daerah pada umumnya dan Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara khususnya dalam melaksanakan program kegiatan selama lima tahun kedepan.